

POLA STRATEGI SINERGIS PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH

Irawaty. A. Kahar *

Abstrak

Pengembangan perpustakaan sekolah di Indonesia cukup memprihatinkan. Data mengungkapkan baru 32% SD yang memiliki perpustakaan sekolah, sedangkan SLTP sebanyak 63% dengan penyebaran yang tidak merata untuk tiap-tiap daerah. Koleksi buku, sarana dan prasarana, serta tenaga pengelola masih jauh dari harapan. Kondisi demikian, tidak dapat dibebankan kepada pihak sekolah semata, banyak pihak yang seharusnya dilibatkan. Sebagai suatu solusi untuk pengembangan perpustakaan sekolah, ditawarkan suatu konsep “Pola strategi sinergis”. Artinya ada satu pola dalam pengembangan perpustakaan sekolah yang terdiri dari: 1) komponen pemerintah (Dinas pendidikan daerah dan BAPERASDA), 2) komponen Sekolah (pimpinan sekolah), dan 3) komponen masyarakat (orang tua murid, perusahaan /pelaku bisnis dan lainnya). Ketiga komponen harus berkomitmen dan bekerja dalam suatu sistem yang memunculkan sinergi sebagai kekuatan untuk mendorong terwujudnya pengembangan perpustakaan sekolah seperti yang diharapkan.

Kata Kunci: Strategi, Sinergis, Perpustakaan Sekolah.

A. Pendahuluan

Dampak transparansi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mengakibatkan terjadinya ledakan informasi yang begitu cepat dan pesat. Sebagai konsekuensi logis mempengaruhi pada semua lapisan kehidupan termasuk kehidupan organisasi.

Perpustakaan sebagai suatu organisasi dan pusat informasi tidak dapat terhindar dari dampak perkembangan teknologi informasi yang telah mengubah wahana penyampaian informasi kepada pengguna. Jika selama ini koleksi perpustakaan berbasis kertas dan cetak, kemudian teknologi membuat penampilan koleksi menjadi

berbasis multi media. Sebagian dari perpustakaan, seperti perpustakaan Nasional, perpustakaan perguruan tinggi, dan perpustakaan umum khususnya yang berada di kota telah banyak yang memanfaatkan teknologi informasi dalam pelayanannya. Bagaimanapun juga dengan memanfaatkan teknologi informasi sangat membantu tugas-tugas perpustakaan lebih cepat dan akurat dalam menemukan dan menyebarkan informasi tersebut.

Namun untuk perpustakaan sekolah yang termasuk salah satu dari jenis perpustakaan di Indonesia, jangankan pelayanan yang berbasis teknologi informasi, masih banyak lagi sekolah yang belum memiliki perpustakaan. Kenyataan tersebut didukung oleh data dari Depdiknas pada tahun 2008, yang mencatat baru 32% Sekolah Dasar (SD) yang memiliki perpustakaan, sedangkan di tingkat SLTP sebanyak 63% dengan penyebaran yang tidak merata. Untuk Daerah Istimewa Yogyakarta 72,8% yang telah memiliki perpustakaan sekolah, bahkan ada sekolah yang hanya 5% memiliki perpustakaan seperti di Maluku Utara. (<http://staf.undip.ac.id/sastra/2009/07/2>). Selain dari itu Perpustakaan Nasional mengungkapkan, bahwa dari 260.000 sekolah dasar negeri hanya 1% yang memiliki perpustakaan sekolah (kompas, 25/7/02). Meskipun ada beberapa sekolah yang memiliki perpustakaan, itupun pada kondisi belum dikelola dengan baik, koleksi serta sarana dan prasarana belum memadai (hasil penelitian beberapa mahasiswa program studi Ilmu Perpustakaan USU 2009). Hanya sekolah favorit dan sekolah yang pimpinannya sadar akan penting perpustakaanlah yang memiliki perpustakaan sekolah yang dikelola dengan baik.

Data-data di atas mengidentifikasi bahwa pengembangan perpustakaan sekolah kurang mendapat perhatian yang serius dari dunia pendidikan dan masih jauh dari harapan, bahkan keberadaan perpustakaan sekolah hanya sebagai *complement* sebuah sekolah. Namun demikian bukan tidak ada upaya dari pemerintah sehubungan dengan pendirian perpustakaan sekolah, sudah sejak lama pemerintah mengeluarkan undang-undang no.2 pasal 35 thn 1989, tentang sistem pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa setiap sekolah diwajibkan memiliki perpustakaan. Meskipun telah ada undang-undang tentang keberadaan perpustakaan sekolah, kita harus dapat memahami bahwa tidaklah mudah untuk mengatasi kondisi perpustakaan sekolah yang memprihatinkan tersebut, banyak komponen yang saling terkait untuk dilibatkan.

Pada kesempatan ini, penulis menawarkan satu konsep “Pola strategi sinergis” artinya adanya satu pola dalam pengembangan perpustakaan sekolah khususnya untuk tingkat daerah, yang melibatkan tiga komponen yaitu: 1) Pemerintah (dinas pendidikan daerah dan BAPERASDA), 2) Sekolah (kepala sekolah). 3) masyarakat (orang tua murid, perusahaan /pelaku bisnis dan lainnya)



Gambar 1.
Pola Strategi sinergis pengembangan Perpustakaan Sekolah

B. Pembahasan

1. Pengembangan Perpustakaan Sekolah

Pengembangan perpustakaan sekolah adalah berbagai kegiatan perbaikan yang dilakukan secara terus-menerus, dan dinamis yang membutuhkan modifikasi agar dapat membantu menghadapi tuntutan kebutuhan perpustakaan sekolah dan masyarakat. Pengembangan yang esensial dan harus ditangani pada perpustakaan sekolah adalah:

- 1 koleksi , harus ditingkatkan baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Koleksi seharusnya dilengkapi dengan buku-buku bacaan yang dapat menarik minat baca peserta didik bukan hanya buku-buku paket saja. Selain itu koleksi perpustakaan sekolah harus disesuaikan dengan kebutuhan siswa yang berbeda untuk tingkat Sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Sesuai dengan perkembangan anak didik, anak-anak pada usia SD bacaannya lebih ditujukan untuk tujuan membangun minat baca anak. Pada usia anak tingkat SLTP, bacaan mulai ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan mereka, sedangkan di tingkat SLTA anak-anak dalam usia meningkat remaja dan bacaannyapun lebih dominan yang berhubungan dengan pengembangan penalaran secara intelektual ditambah dengan

- buku-buku fiksi, komik yang bermuatan nilai positif, menarik serta mendidik.
- 2 Sarana dan prasarana, seperti tersedianya ruang perpustakaan, yang dilengkapi dengan perabot atau mobiler yang ditata rapi dan bersih sehingga memberi kenyamanan bagi anak didik. Sarana komputer untuk memperlancar tugas-tugas perpustakaan.
 - 3 Sumber daya manusia perpustakaan. Selama ini yang bertanggung jawab mengelola perpustakaan sekolah adalah guru yang disebut guru pustakawan dengan tugas ganda sebagai guru dan sebagai pengelola perpustakaan sekolah. Pada umumnya mereka tidak memiliki dasar pendidikan perpustakaan. Malahan ada kasus pemindahan guru bermasalah menganiaya siswa dipindahtugaskan menjadi mengelola perpustakaan sekolah (<http://staf.undip.ac.id/sastra/2009/07/2>) hal ini menunjukkan masih kurangnya pemahaman pihak sekolah akan profesionalisme pustakawan.

Untuk menjadi seorang pustakawan tidaklah mudah ia harus memiliki kompetensi tertentu. Menurut Mirabile (1997: 3) “kompetensi adalah suatu pengetahuan, keterampilan, kemampuan, atau hal-hal yang berhubungan dengan kinerja yang tinggi dalam pekerjaan, seperti penyelesaian masalah, pemikiran analitik, atau kepemimpinan” Aspey (1998: 2) menyatakan bahwa kompetensi tidak hanya meliputi penguasaan keterampilan dan pengetahuan saja, tetapi juga termasuk penguasaan terhadap tugas, dan motivasi dalam menjalankan tugas tersebut. Dalam hal ini berarti kompetensi meliputi pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan individu yang akan berperan dalam keberhasilan pelaksanaan tugas tugas yang dibebankan kepadanya. *Special Libraries Association* (1996: 6) merumuskan dua jenis kompetensi abad 21 untuk para pendidik, mahasiswa, praktisi dan pegawai, yaitu (1) kompetensi profesional, yang terkait dengan pengetahuan pustakawan di bidang sumber-sumber informasi, teknologi, manajemen dan penelitian, serta kemampuan kemampuan menggunakan pengetahuan tersebut sebagai dasar untuk menyediakan layana perpustakaan dan informasi, (2) kompetensi individu yang menggambarkan satu kesatuan keterampilan, perilaku dan nilai yang dimiliki pustakawan, agar dapat bekerja secara efektif, menjadi komunikator yang baik, selalu meningkatkan pengetahuan, dapat memperlihatkan nilai lebihnya, serta dapat bertahan terhadap perubahan dan perkembangan dalam

dunia kerjanya. Seorang pustakawan disamping menguasai bidang perpustakaan dan informasi, ia dituntut harus memiliki tiga kompetensi utama, yaitu kemampuan interpersonal yang baik, kemampuan komunikasi, dan kemampuan penguasaan Teknologi Informasi (TI).

Menurut Anthony (2002: 18) agar pustakawan perpustakaan sekolah efektif, ia harus mempunyai tiga dasar pengetahuan yaitu: (1) pengetahuan pendidikan, (2) pengetahuan perpustakaan, dan (3) pengetahuan teknologi. Untuk itu di luar negeri yang dinamakan guru pustakawan bukanlah guru yang ditugaskan menjadi pustakawan sekolah, akan tetapi guru menambah pendidikannya lagi pada jurusan ilmu perpustakaan (*a postgraduate course in school librarianship*) atau setidaknya mengikuti pelatihan bidang ilmu perpustakaan. Sedangkan pustakawan dengan pendidikan ilmu perpustakaan untuk menjadi pengelola perpustakaan sekolah, harus mengikuti training kependidikan.

Memberikan tugas pengelolaan perpustakaan kepada guru bukanlah suatu pemecahan masalah, dan perlu dikaji ulang. Guru yang memiliki tugas utama sebagai pengajar, diragukan kemampuannya untuk dapat mengembangkan perpustakaan sekolah secara maksimal. Hal ini terlihat di lapangan, bahwa perpustakaan sekolah akan tutup apabila guru dalam jadwal mengajar.

Dalam menangani permasalahan pengembangan perpustakaan sekolah, tidak akan mungkin dibebankan tanggungjawabnya kepada pihak sekolah semata. Untuk itu dibutuhkan kekuatan sinergis yang terdiri dari tiga komponen utama, yaitu pemerintah, sekolah, dan masyarakat, hal ini sangatlah penting mengingat kompleksnya permasalahan.

2. Komponen Pemerintah

Pemerintah yang dilibatkan dalam pengembangan perpustakaan sekolah adalah Diknas Pendidikan, dan Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BAPERASDA), kedua lembaga ini turut memayungi dan bertanggung jawab terhadap perpustakaan sekolah yang berada di daerah.

Otonomi daerah terhadap pengembangan perpustakaan sekolah memiliki dampak yang signifikan, dan dapat diprediksi bahwa pengembangan perpustakaan sekolah akan mengalami masadepan yang suram (jalan di tempat) karena kurangnya perhatian pemerintah

daerah. Kurangnya perhatian pemerintah daerah terhadap perpustakaan sekolah terlihat di Sumatera Utara. Di daerah Medan Marelan terdapat 22 SD Negeri, hanya 9 SD saja yang memiliki perpustakaan sekolah itupun belum dikelola dengan baik (Sumber: Dinas Pendidikan Nasional Kota Medan).

Keterbatasan dana, mengakibatkan perpustakaan sekolah tidak mampu membeli buku, menyediakan sarana dan prasarana yang memadai serta mengadakan tenaga profesional untuk mengelola perpustakaan. Pemerintah daerah sudah seharusnya berupaya *memanage* ulang dana yang ada dan disalurkan kepada sekolah yang berhak mendapatkannya secara bertahap dan bergilir. Jika upaya ini dilakukan berkesinambungan, merupakan suatu bukti kepedulian pemerintah terhadap pengembangan perpustakaan sekolah.

Tanggung jawab BAPERASDA selama ini terhadap pengembangan perpustakaan sekolah memang ada, yaitu berupa bantuan koleksi cerita anak, pengarahan dan pelatihan tenaga pengelola perpustakaan. Bantuan ini tentu dilakukan tidak untuk semua sekolah dan tidak berkelanjutan karena merupakan sebuah projek. Menurut BAPERASDA tentang pembelian buku-buku perpustakaan sekolah adalah menjadi tanggung jawab penuh Diknas pendidikan. Diharapkan BAPERASDA melanjutkan bantuan ini untuk pengembangan perpustakaan sekolah, strategi lain bisa juga dilakukan bantuan melalui Perpustakaan keliling dengan cara menitipkan koleksi perpustakaan keliling di perpustakaan sekolah (*temporary stasionary of book collection*) dalam kurun waktu yang ditetapkan buku diambil kembali kemudian ditukar dengan koleksi lainnya.

Upaya apapun yang dilakukan kalau tidak dilandasi dengan suatu kebijakan, tidak akan dapat memenuhi harapan dan tujuan. Sehubungan dengan itu **strategi utama** yang dilakukan pemerintah daerah adalah harus ada "*goodwill*" dari pemerintah dengan sungguh-sungguh mengagendakan pembangunan perpustakaan sekolah menjadi prioritas melalui penyusunan kebijakan tentang pengembangan perpustakaan sekolah di daerah. Kebijakan selayaknya bersifat proaktif, proporsional, rasional, adaptif, dan bersifat aplikatif sesuai dengan nuansa otonomi daerah. Disamping itu kita berada di era informasi, kebijakan juga mempertimbangkan kemajuan Teknologi Informasi, isu globalisasi dan sosial kultur daerah setempat. Pengembangan perpustakaan sekolah sudah harus dituangkan dalam

bentuk perencanaan strategis (Renstra) setidaknya dalam kurun waktu 5 tahun ke depan.

3. Komponen Pimpinan Sekolah

Pada tingkat sekolah yang menjadi pimpinan adalah kepala sekolah yang merupakan figur kunci dalam mendorong perkembangan perpustakaan sekolah. Menurut Wahyosumidjo (2002: 8) kepala sekolah adalah seorang tenaga fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu sekolah dimana diselenggarakan proses belajar mengajar. Dinas pendidikan telah menetapkan bahwa kepala sekolah harus mampu berperan sebagai educator, manajer, administrator, dan supervisor (EMAS) peran tersebut dapat juga dikatakan sebagai peran internal. Yang paling penting kepala sekolah juga mampu melakukan peran ekstrenal yaitu terhadap lingkungan masyarakat di luar sekolah. Berkaitan dengan itu Mulyasa (2006: 98) mengemukakan, seorang kepala sekolah sebagai penghubung masyarakat (*liason*), menjalin hubungan kerjasama sekolah dengan instansi yang terkait dalam usaha kegiatan sekolah untuk menarik masyarakat, warga sekitarnya agar lebih banyak berpartisipasi dalam kegiatan pengembangan sekolah termasuk perpustakaan sekolah. Dalam kontek ini kepala sekolah juga dituntut kemampuannya berkomunikasi yang baik

Strategi yang dilakukan oleh kepala sekolah sehubungan dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat dalam membantu pengembangan perpustakaan sekolah adalah (1) menjembatani sekolah dengan masyarakat. dalam hal pengumpulan dana dari orang tua yang mampu dan alumni untuk melengkapi sarana dan prasarana, (2) memobilisasi bantuan masyarakat untuk memenuhi pengembangan perpustakaan sekolah, terutama mengadakan *link* ke BUMN, idustri/pelaku bisnis yang ada di daerah. Permintaan bantuan sudah barang tentu melalui penyusunan proposal yang layak, logis dan akuntabilitas. Bantuan yang diminta bukan saja dalam bentuk uang akan lebih baik dalam bentuk sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

4. Komponen Masyarakat

Unsur masyarakat yang terkait dengan pengembangan perpustakaan sekolah, terdiri dari orang tua/wali peserta didik, tokoh pendidikan, pelaku bisnis/Industri, alumni peserta didik. Strategi yang dilakukan terhadap unsur-unsur masyarakat tersebut adalah kepala

sekolah harus menggugah masyarakat untuk memberikan kontribusi secara langsung. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan perpustakaan sekolah bukan karena ketidakpedulian mereka, akan tetapi lebih banyak disebabkan oleh kurangnya pendekatan dan sosialisasi kepala sekolah akan pentingnya perpustakaan sekolah dalam meningkatkan pengetahuan dan minat baca peserta didik.

Partisipasi masyarakat merupakan modal utama, hal ini dapat dilakukan oleh beberapa kelompok masyarakat yang terkait dengan dunia pendidikan memberikan bantuan secara sukarela dalam wujud materil. Kita dapat mengambil contoh Mesjid-mesjid dapat dibangun atas bantuan masyarakat, untuk pengembangan perpustakaan sekolah kenapa tidak. Selain dari itu kita perlu belajar pada langkah kongrit yang telah dilakukan oleh Coca-cola Foundation Indonesia (CCFI) yang telah berhasil dimintai bantuan dengan program pengembangan pustakawan perpustakaan urban yang dicanangkan secara swadaya mulai tahun 2000, kemudian Taman bacaan Rakyat di Sumatera Utara (Harian kompas: 2 Des 2001). Kesemua itu merupakan suatu terobosan dan wujud nyata dari tanggungjawab moral masyarakat dalam mencedakan kehidupan bangsa.

Untuk efektifnya strategi-strategi yang dilakukan terhadap pengembangan perpustakaan sekolah, harus menganut "Pola Strategi Sinergis" dengan tiga komponen. Ketiga komponen tersebut tidak dapat berjalan sendiri sendiri. kesemuanya harus berkomitmen dan berkordinasi serta bekerja dalam suatu sistem yang akan membentuk sinergi menjadi suatu kekuatan untuk mendorong terwujudnya pengembangan perpustakaan sekolah seperti yang diharapkan.

C. Penutup

Berdasarkan uraian diatas maka akhir dari tulisan ini dapat disimpulkan bahwa: 1) Pengembangan Perpustakaan sekolah di Indonesia dan khususnya di Sumatera Utara kurang mendapat perhatian yang serius dari pemerintah, 2) Data mengungkapkan bahwa baru 32% Sekolah Dasar yang memiliki perpustakaan sekolah, sedangkan untuk tingkat SLTP sebanyak 63%, dengan sebaran yang tidak merata untuk tiap-tiap provinsi, 3) Kondisi koleksi buku, sarana dan prasarana, serta tenaga pengelola profesional masih jauh dari harapan.

Sebagai solusi untuk efektifnya pengembangan perpustakaan sekolah, ditawarkan satu konsep “Pola strategi sinergis” yang artinya adanya satu pola dalam pengembangan perpustakaan sekolah yang terdiri dari 3 komponen yaitu : (1) komponen pemerintah (Dinas pendidikan daerah dan BAPERASDA), (2) komponen Sekolah (pimpinan sekolah), dan (3) dan (3) komponen masyarakat (orang tua murid, perusahaan /pelaku bisnis dan lainnya)

Ketiga komponen harus berkomitmen dan berkordinasi serta bekerja dalam suatu sistem yang memunculkan sinergi sebagai kekuatan untuk mendorong terwujudnya pengembangan perpustakaan sekolah seperti yang diharapkan.

DAFTAR BACAAN

Aspey, Alan. 1998. *Seeking motivation*. People management. 10 December 1998, p.23.

[http://staf.undip.ac.id/sastra/desyrydany/2009/07/2.Perpustakaan Sekolah Nasibmu Kini.](http://staf.undip.ac.id/sastra/desyrydany/2009/07/2.PerpustakaanSekolahNasibmuKini)

Mirabile, R.J. 1997. *Everything you wanted to know about competency modeling*. Training and development journal, vol.40 No.8, p.73-78.

Mulyasa, E. 2006. *Menjadi Kepala Sekolah Profesional: Dalam konteks Menyukkseskan MBS dan KBK*. Bandung: Remaja Rosda Karya.

Nurkolis. 2003. *Manajemen Berbasis Sekolah: teori, model dan Aplikasi* . Jakarta: Grasindo.

Wahyosumidjo. 2002. *Kepemimpinan Kepala Sekolah: tinjauan teoretik dan permasalahannya*. Jakarta: Rajawali

* Dr. Irawaty A. Kahar, M.Pd adalah Dosen Jurusan Perpustakaan USU Sumatera Utara.